

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Assegaf. Ahmad Fikri dan Eljana Tanzah, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- A. Hamid S. Attamaini, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Disertasi) Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Bagir Manan, Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Brugink J.J.H, alih bahasa Alief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Doli. D. Siregar, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara, Peran Konsultan Penilai Dalam Pemulihan Kondisi Nasional*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, Russlell and Russlell, New York, 1961.
- Herry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciation*, Six Edition, St. Paul Min: West Publishing Co, 1990.
- Jimly Asshiddiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan yang Demokratis*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Mantay Borbir, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002

— dan Arif b. Sidharta, *“Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, 1994.

Paul Shcolten, dalam Purnama Tioria Siantury, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Philipus M. Hadjon. R, Sri Soemantri Martosoewignjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Rochmat Soemitro, *Peraturan Dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 1987.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dari Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adiyta Bhakti, Bandung, 2006.

Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010.

Sri Muadji, et al. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Utrecht E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1961

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

STB 1908 No.189 (*verdue Reglement*) Tentang Peraturan Lelang

STB 1908 No.190 (*Vendue Instruktie*) Tentang Instruksi Lelang

SKM No. 337/KMK.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

KKM No. 450/KMK.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

KKM No. 304/KMK.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

KMK No. 338/KMK.01/2000 Tentang Pejabat Lelang

KMK No. 508/KMK.01/2000 Tentang Pejabat Lelang

PMK No. 40/PMK.07/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

PMK No. 119/PMK.07/2005 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

PMK No. 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

PMK No. 159/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

PMK No. 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

PMK No. 158/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas I

PMK No. 40/PMK.06/2006, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

PMK No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

PEDIRJEN No. 6/KN/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang (*Vendu Reglement. Ordonatie* 28 Februari 1908  
Staatblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan staatblad 1941:3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah terakhir  
kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
61/PMK.06/2008 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*, Staatsblad 1908:190  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Staatsblad 1930:85).

